



PEMERINTAH KOTA MADIUN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 37 Madiun, Kode Pos 63116 Jawa Timur
Telepon (0351) 462756, Fax (0351) 457331
Website <http://www.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

NOMOR : 060-401.021/ 6 /2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN

SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dan untuk mengoptimalkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Daerah Kota Madiun, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan alat ukur berupa Indikator Kinerja Utama;
 - b. bahwa guna mewujudkan hal tersebut pada huruf a, Keputusan Sekretaris Daerah Nomor: 060-401.021/016/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Madiun dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Madiun;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2022;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026;
11. Peraturan Walikota Madiun Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2023;
12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2025-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2025-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum “PERTAMA” bertujuan untuk :
- memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
 - mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum “PERTAMA” dimanfaatkan untuk :
- perencanaan strategis;
 - perencanaan tahunan;
 - penetapan kinerja;
 - pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
 - evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku 1 Januari 2025.

Ditetapkan di M A D I U N
pada tanggal 10 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH,

SOEKO DWI HANDIARTO

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Kota : Madiun
- Instansi : Sekretariat Daerah
- Tugas : membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Satpol PP, dan Kecamatan
- Fungsi : a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Satpol PP, dan Kecamatan;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah
- e. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan Wali Kota

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	RUMUS PENGHITUNGAN/ PENJELASAN	SUMBER DATA
1.	TUJUAN Terwujudnya koordinasi tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang bersinergi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun	Persentase ketercapaian realisasi rencana aksi reformasi birokrasi terhadap target	Jumlah rencana aksi reformasi yang realisasinya mencapai target dibagi jumlah rencana aksi reformasi birokrasi dikali 100%	Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi oleh Kemenpan RB

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	RUMUS PENGHITUNGAN/ PENJELASAN	SUMBER DATA
1.	SASARAN Meningkatnya kualitas internalisasi budaya kerja	Hasil survei internalisasi budaya kerja	Skor hasil internalisasi budaya kerja	Laporan hasil survei internalisasi budaya kerja
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Nilai Hasil Evaluasi Pelayanan Publik	Laporan Hasil Evaluasi Pelayanan Publik oleh Bagian Organisasi
3.	Meningkatnya kualitas kelembagaan	Tingkat Kematangan Organisasi	Hasil Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi	Laporan Hasil Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi oleh Bagian Organisasi
4.	Meningkatnya kualitas tata kelola pengadaan barang/jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	Nilai Hasil Evaluasi Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan Hasil Evaluasi Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa oleh LKPP

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	RUMUS PENGHITUNGAN/ PENJELASAN	SUMBER DATA
5.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat
6.	Peningkatan kualitas penyusunan kebijakan	Indeks kualitas kebijakan	Skor hasil evaluasi kualitas kebijakan	Laporan hasil evaluasi kualitas kebijakan oleh LAN
7.	Peningkatan akuntabilitas dalam pengukuran dan pelaporan kinerja	Nilai komponen pengukuran kinerja SAKIP	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komponen Pengukuran Kinerja	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh KemenPAN RB
		Nilai komponen pelaporan kinerja SAKIP	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	RUMUS PENGHITUNGAN/ PENJELASAN	SUMBER DATA
			Komponen Pelaporan Kinerja	Kinerja Instansi Pemerintah oleh KemenPAN RB
8.	Peningkatan harmonisasi regulasi	Indeks Reformasi Hukum	Skor hasil evaluasi reformasi hukum	Laporan hasil evaluasi kualitas reformasi hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM
9.	Meningkatnya capaian kinerja indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase capaian kinerja indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencapai target dibagi jumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja kunci penyelenggaraan	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	RUMUS PENGHITUNGAN/ PENJELASAN	SUMBER DATA
			pemerintahan daerah dikali 100%	
10.	Meningkatnya capaian kinerja program pengendalian inflasi	Persentase ketercapaian kinerja peta jalan inflasi	Jumlah program kinerja pengendalian inflasi yang mencapai target dibagi jumlah program kinerja pengendalian inflasi dikali 100%	Laporan capaian kinerja program pengendalian inflasi